# PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

**Pembimbing :**

**Dr. Ony Widilestariningtyas, SE., M.Si., Ak., CA**

**Oleh:**

**Tito Apriato Muslim**

**Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Komputer Indonesia**

***ABSTRACT***

*This research was conducted at the Regional Work Units Bandung regency. The phenomenon that occurs is the lack of accountability of financial management and budget use leftover which reach half a trillion rupiah show that does not have the careful planning in managing their budgets.*

*The purpose of this study was to determine how much influence the financial management and performance-based budgets of local government performance. The method used in this research is descriptive and verfikatif method with quantitative approach. The population in this study was 28 SKPD in Bandung regency with respondents Subdivision Budget Planning. Sampling was done by using the withdrawal of non-probability sampling is by using saturated sampling. Data collected through questionnaires. The resulting data were analyzed using SEM analysis tools with PLS approach, calculators using SEM-PLS 2.0 program.*

*The results showed that the area of financial management have a significant effect on the performance of local government in Bandung regency SKPD and performance-based budgeting significant effect on the performance of local government in SKPD Bandung regency.*

*Keywords: Financial Management, Performance-Based Budgeting, the Local Government Performance*

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia telah memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan refor masi disegala bidang. Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *Good Governance*. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah. (Mei Anjarwati, 2012)

Kinerja pemerintah daerah selama ini masih rendah. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kinerja pemerintah daerah tersebut rendah, diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggung jawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD serta pengawasan. Dalam proses penganggaran, pemerintah daerah selalu mengalami keterlambatan didalam pengesahan perda APBD. Keterlambatan ini menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan sehingga terjadi keterlambatan pembangunan daerah. (Nurhalimah, Darwanis, Syukriy Abdulla, 2013)

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rumusan skema strategis suatu organisasi.Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Ukuran kinerja suatu organisasi sangat penting, guna evaluasi dan perencanaan masa depan. Beberapa jenis informasi yang digunakan dalam pengawasan disiapkan

dalam rangka menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian mengukur kinerja tidak hanya informasi finansial tetapi juga informasi nonfinansial. (Indra Bastian, 2010)

Peran penting anggaran dalam perencanaan dicapai dengan menyatakan dalam nilai uang besarnya input yang diperlukan untuk melaksanakan aktifitas yang direncanakan dalam periode anggaran. Sementara peranan anggaran dalam pengendalian dapat dicapai dengan mempersiapkan anggaran dengan cara yang dapat menunjukkan input dan sumber daya yang telah dialokasikan kepada individu atau departemen sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan tugas yang dibebankan kepada mereka. Organisasi sektor publik sering berhadapan dengan kurangnya pengukuran output yang sesuai, sehingga pengukuran efektivitas didasarkan pada input yang digunakan. Padahal, pengeluaran yang dialokasikan tersebut menunjukkan berapa jumlah dana maksimum yang dapat dikeluarkan untuk kegiatan ini, melainkan juga alokasi tersebut memberikan indikasi mengenai berapa level dari pemberian jasa. (Jalaluddin, Dafi Bahri, 2009)

Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting, sehingga proses penyusunan anggaran merupakan aspek penting dalam pencapaian keberhasilan dari suatu organisasi. Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran yang dinamakan dengan partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran melibatkan bawahan dalam proses penyusunannya, sehingga bawahan yang kinerjanya diukur berdasarkan anggaran akan termotivasi untuk mencapai kinerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan pendekatan manajerial yang umumnya dinilai dapat meningkatkan kinerja manajerial. (Prihandini, 2011)

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem yang mencakup kegiatan penyusunan dan tolak ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran. (Mahmudi, 2010:158)

Dalam meningkatkan kinerja organisasi tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Banyak faktor yang turut menentukan suatu organisasi sukses dalam meningkatkan kinerja yaitu pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau organisasi. Pengelolaan Keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pula pada suatu instansi atau organisasi. (Rahmad Hidayat, 2015)

Berdasarkan uraian di atas serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah".**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan mengumpulkan data yang akurat dan relevan dengan uji empiris, guna memecahkan masalah.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang mengenai praktik pengelolaan keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bandung.

### 1.4.2 Kegunaan Akademis

Penulis berharap hasil penelitian dapat memberi manfaat dan selain itu mengembangkan ilmu, dimana teori yang telah ada diuji kembali dalam penelitian ini dapat memperkuat teori yang telah ada yaitu pengelolaan keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

## II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### 2.1 Kajian Pustaka

#### 2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Muindro Renyowijoyo (2013:199) bahwa pengertian pengelolaan keuangan daerah merupakan Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### 2.1.2 Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Indra Bastian (2010:202) Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. Performance budgeting mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output (output measurement).

#### 2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Indra Bastian (2010:329) bahwa Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

### 2.2 Kerangka Pemikiran

#### 2.2.1 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Chabib Soleh dan Suripto (2011:4) menyatakan bahwa:

> "Kinerja pemerintah daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkat pencapaian hasil, dikaitkan dengan misi dan visi organisasi, serta dampak positif dan negatif yang diakibatkan dari suatu kebijakan operasional yang telah diambil. Melalui informasi tersebut, selanjutnya dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas suatu kebijakan, menetapkan kegiatan/program utama, dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai umpan balik sebagai bahan untuk perencanaan, penentuan tingkat keberhasilan, serta untuk memutuskan suatu tindakan yang dinilai paling rasional dan menguntungkan.

#### 2.2.2 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Deddi Nordiawan (2007), menyatakan bahwa:

> "Keuangan anggaran adalah sebagai alat penilaian kinerja, artinya anggaran merupakan suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktifitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya".

### 2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran. Menurut Sugiyono (2013:99) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalahpenelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikanbaru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan penulis. Untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara pengelolaan keuangan dan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

$H_1$: Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

$H_2$: Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

## II. Objek dan Metode Penelitian

### 3.1 Objek Penelitian

Pengertian objek penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:38), menyatakan bahwa objek penelitian adalah sebagai berikut:

> "Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Berbasis Kinerja dan Kinerja Pemerintah Daerah.

**3.2 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian menurut Sugiyono (2013:2) menyatakan bahwa:

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan carailmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah".

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data dapat dikumpulkan, dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan teori-teori yang telah dipelajari.

**3.3 Desain Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu perencanaan dan perencanaan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistimatis. Menurut Umi Narimawati (2010 : 30) desain penelitian adalah:

"Semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu. Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu. Menurut Sugiyono (2008:13) dapat disimpulkan proses penelitian kuantitatif meliputi:

1. Sumber masalah
2. Rumusan masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
4. Pengajuan hipotesis
5. Metode penelitian
6. Menyusun instrumen penelitian
7. Kesimpulan

Berdasarkan proses penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka desain pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber masalah
   Membuat identifikasi masalah berdasarkan latar belakang penelitian sehingga mendapatkan judul sesuai dengan masalah yang ditemukan. Identifikasi masalah diperoleh dari adanya fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Rumusan masalah
   Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Proses penemuan masalah merupakan tahap penelitian yang paling sulit karena tujuan penelitian tidak dapat dilakukan dengan baik jika masalahnya tidak dirumuskan secara jelas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

   1) Seberapa besar pengeloln keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Bandung.
   2) Seberapa besar penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Bandung.
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan

Untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara (berhipotesis), maka peneliti mengkaji teori-teori yang relevan dengan masalah. Selain itu penemuan penelitian sebelumnya yang relevan juga digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara terhadap masalah penelitian (hipotesis). Telaah teoritis mempunyai tujuan untuk menyusun kerangka teoritis yang menjadi dasar untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian yang merupakan tahap penelitian dengan menguji terpenuhinya kriteria pengetahuan yang rasional.

4. Pengajuan hipotesis
   Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris (faktual). Berikut hipotesa yang dirumuskan peneliti:

   $H_1$: Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
   $H_2$: Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

5. Metode penelitian
   Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data dapat dikumpulkan, dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan teori-teori yang telah dipelajari.

6. Menyusun instrumen penelitian
   Setelah metode penelitian yang sesuai dipilih, maka peneliti dapat menyusun instrumen penelitian. Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data. Instrumen pada penelitian ini berbentuk kuesioner, untuk pedoman wawancara atau observasi. Sebelum instrumen digunakan untuk pengumpulan data, maka instrumen penelitian harus terlebih dulu diuji validitas dan reabilitasnya. Dimana validitas digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah alat ukur dan reabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana pengukuran tersebut dapat dipercaya. Setalah data terkumpul maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik tertentu. Selanjutnya peneliti menganalisis dan mengambil sampel untuk melakukan penelitian mengenai:

   a. Untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
   b. Untuk menganalisis pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah.

7. Kesimpulan
   Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban atas rumusan masalah. Dengan menekankan pada pemecahan masalah berupa informasi mengenai solusi masalah berupa informasi mengenai solusi masalah yang bermanfaat sebagai dasar untuk pembuatan keputusan.

**3.4 Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel menurut Nur Indriantoro (2002) dalam Umi Narimawati (2010:31) adalah sebagai berikut:

"Penentuan construct sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Defenisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan peneliti dalam mengoperasionalisasikan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengujuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik".

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabelvariabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian.

Variabel dalam konteks penelitian menurut Sugiyono (2013:63) adalah:

"Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,kemudian ditarik kesimpulannya".

Berdasarkan judul penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah:

1) Variabel bebas (*Independent*)

Menurut Sugiyono (2013:64) menjelaskan bahwa:

> "Variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)".

Variabel *independent* pada penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) dan Anggaran Berbasis Kinerja (X2).

2) Variabel terikat (*dependent*)

Menurut Sugiyono (2013:64) menjelaskan bahwa:

> "Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas".

Variabel *dependent* dalam hal ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

**3.5 Sumber Data**

Sumber data dapat dibagi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2013:136) mendefinisikan sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

> "Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalkan dari pihak lain atau lewat dokumen".

Berdasarkan penjelasan diatas, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti dengan menyebarkan kuesioner. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah 28 SKPD Kabupaten Bandung.

**3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan (*Library Reseach*). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Penelitian lapangan (*Field Research*)

a) Kuesioner

Menurut Umi Narimawati (2010:40) sebagai berikut:

> "Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Litera seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya".

Adapun kuesioner dilakukan kepada Sub Bagian Perencanaan Anggaran pada setiap SKPD Kabupaten Bandung.

b) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi *Literature* dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah *Literature* berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitianpenelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkanakan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

**3.7 Populasi dan Penarikan Sample**

Untuk menunjang hasil penelitian, maka peneliti melakukan pengelompokan data yang diperlukan kedalam dua golongan, yaitu:

1) Populasi

Pengertian populasi menurut Umi Narimawati (2008:161) adalah sebagai berikut:

"Populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis penelitian".

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabuapten Bandung sebanyak 28 SKPD. Unit observasi dalam penelitian ini adalah Sub Bagian Perencanaan Anggaran SKPD Kabupaten Bandung yang berjumlah 28 orang.

2) Sample

Pengertian sampel menurut Umi Narimawati (2010:38) adalah sebagai berikut:

"Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian".

Dalam penelitian ini penulis melakukan penarikan sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh.

Menurut Sugiyono (2011:126) mengatakan bahwa :

"Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil".

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabuapten Bandung sebanyak 28 SKPD. Unit observasi dalam penelitian ini adalah Sub Bagian Perencanaan Anggaran SKPD Kabupaten Bandung yang berjumlah 28 orang.

**3.8 Pengujian Hipotesis**

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi, cara ini telah mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota populasi. Setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut dapat digunakan untuk menguji pernyataan populasi, apakah bukti empiris dari sampel mendukung atau menolak pernyataan mengenai populasi. Seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis.

Menurut Suharyadi dan Purwanto S.K (2009:112) pengujian hipotesis didefinisikan sebagai berikut:

"Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karenanya harus ditolak".

Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H0 ditolak jika thitung lebih besar dari nilai kritis untuk α = 0,05 sebesar 1,960.

1) Hipotesis 1

Hipotesis pertama adalah pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, Persamaan model struktural:

$$\eta = \beta \xi_1 + \zeta$$

2) Hipotesis 2

Hipotesis kedua adalah Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Persamaan model structural:

$$\eta = \gamma \xi_2 + \zeta$$

Untuk menguji hipotesis kedua dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_o$ : $\gamma = 0$ : Pengaruh $\xi_2$ terhadap $\eta$ tidak signifikan

$H_1$ : $\gamma \neq 0$ : Pengaruh $\xi_2$ terhadap $\eta$ signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\lambda}{SE(\lambda)}$$

Tolak $H_o$ jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana $t_{tabel}$ untuk α = 0,05 sebesar 1,960.

**1) Menggambarkan Daerah Penerimaan dan Penolakan**

Untuk menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan terhadap sebuah hipotesis dapat digambarkan dengan uji dua pihak daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.

**Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis**




Sumber : Sugiyono dalam Umi Narimawati (2010:54)

**Gambar 3.1**
**Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis**

## IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Analisis Deskriptif

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diukur dengan menggunakan 5 indikator yang dioperasionalisasikan ke dalam 5 pernyataan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa nilai persentase tertinggi yang diperoleh sebesar 67,86% berkenaan dengan transparansi dan value of money, sedangkan nilai persentase terendah yang diperoleh sebesar 63,57% mengenai akuntabilitas. Secara keseluruhan, dari variabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang diperoleh sebesar 65,71%.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Berbasis Kinerja yang diukur dengan menggunakan 8 indikator yang dioperasionalisasikan ke dalam 8 pernyataan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa nilai persentase tertinggi yang diperoleh sebesar 67,14% berkenaan dengan penyusunan program, pelaporan kerja, evaluasi kinerja dan umpan balik, sedangkan nilai persentase terendah yang diperoleh sebesar 65% mengenai perumusan strategi. Secara keseluruhan, dari variabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang diperoleh sebesar 66,3.

3. Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja Pemerintah Daerah yang diukur dengan menggunakan 3 indikator yang dioperasionalisasikan ke dalam 3 pernyataan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa nilai persentase tertinggi yang diperoleh sebesar 67,86% berkenaan dengan ekonomis, sedangkan nilai persentase terendah yang diperoleh sebesar 65% mengenai efisiensi. Secara keseluruhan, dari variabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang diperoleh sebesar 66,7%.

#### 4.1.2 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah adanya pengaruh dari pengelolaan keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah. Metode statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah *structural equation modelling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Dalam *structural equation modeling* ada dua jenis model yang terbentuk, yakni model pengukuran (*outer model*) serta model struktural (*inner model*). *Outer model* ini menjelaskan proporsi varians setiap variabel *manifest* (indikator) yang dapat dijelaskan dalam variabel laten. Melalui *outer model* akan diketahui indikator mana saja yang dominan dalam pembentukkan variabel laten. Setelah model pengukuran pada

setiap variabel laten diuraikan, selanjutnya diuraikan model struktural yang akan mengkaji pengaruh dari masing-masing variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen.

1. **Koefisien Korelasi**
   a. Koefisien korelasi yang diperoleh antara pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah adalah sebesar 0,384 dan termasuk ke dalam kriteria korelasi cukup dengan arah positif. Artinya pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik akan diikuti dengan kinerja pemerintah daerah yang cukup baik pula. Nilai thitung yang diperoleh adalah sebesar 3,616 lebih besar dari nilai tkritis 1,96. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya hubungan positif dan signifikan antara pengelolaan keiangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah.
   b. Koefisien korelasi yang diperoleh antara anggaran berbasis kinerja dengan kinerja pemerintah daerah adalah sebesar 0,587 dan termasuk ke dalam kriteria korelasi cukup dengan arah positif. Artinya anggaran berbasis kinerja yang cukup baik akan diikuti dengan kinerja pemerintah daerah yang cukup baik pula. Nilai thitung yang diperoleh adalah sebesar 7,679 lebih besar dari nilai tkritis 1,96. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya hubungan positif dan signifikan antara anggaran berbasis kinerja dengan kinerja pemerintah daerah.

2. **Koefisien Determinasi**
   a. Nilai koefisien determinasi ($R^2$) pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah sebesar 13,6% dan termasuk ke dalam kriteria determinasi tinggi. Artinya kontribusi pengelolaan keuangan daerah sebesar 13,6% terhadap kinerja pemerintah daerah, sisanya sebesar 86,4%, tetapi 33,4% diantaranya dipengaruhi oleh variabel $X_2$ yaitu anggaran berbasis kinerja dan sisanya sebesar 53% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
   b. Nilai koefisien determinasi ($R^2$) anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah sebesar 33,4% dan termasuk ke dalam kriteria determinasi tinggi. Artinya kontribusi anggaran berbasis kinerja sebesar 33,4% terhadap kinerja pemerintah daerah, sisanya sebesar 66,6% tetapi 13,6% diantaranya dipengaruhi oleh variabel $X_1$ yaitu sistem akuntansi keuangan daerah dan sisanya sebesar 53% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

### 4.2 Pembahasan

#### 4.2.1 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung}$ sebesar 3,616 lebih besar dari $t_{tabel}$ (1,960) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh sebesar 13,6% terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai korelasi sebesar 0,384 yang berarti pengelolaan keuangan daerah memberikan pengaruh yang rendah dengan arah hubungan yang positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bandung. Arah hubungan positif pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik akan diikuti dengan kinerja pemerintah daerah yang baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah memberikan pengaruh sebesar 13,6% terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan sisanya 86.4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, di mana pengelolaan keuangan daerah yang baik akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bandung

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, menurut Chabib Soleh dan Suripto (2011:4) menyatakan bahwa Kinerja pemerintah daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkat pencapaian hasil, dikaitkan dengan misi dan visi organisasi, serta dampak positif dan negatif yang diakibatkan dari suatu kebijakan operasional yang telah diambil. Melalui informasi tersebut, selanjutnya dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas suatu kebijakan, menetapkan kegiatan/program utama, dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai umpan balik sebagai bahan untuk perencanaan, penentuan tingkat keberhasilan, serta untuk memutuskan suatu tindakan yang dinilai paling rasional dan menguntungkan.

Dan hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ismail Molamahu (2015) tentang pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

#### 4.2.2 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung}$ sebesar 7,679 lebih besar dari $t_{tabel}$ (1,960) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 2 signifikan. Artinya anggararan berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, anggaran berbasis kinerja berpengaruh sebesar 33,4% terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai korelasi sebesar 0,587 yang berarti anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh yang sedang/cukup dengan arah hubungan yang positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bandung. Arah hubungan positif anggaran berbasis kinerja dengan kinerja pemerintah daerah menunjukan bahwa anggaran berbasis kinerja yang semakin baik akan diikuti dengan kinerja pemerintah daerah yang baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh sebesar 33,4% terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan sisanya 66.6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, di mana anggaran berbasis kinerja yang baik akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:59) yang menyatakan bahwa Anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh yang baik bagi kinerja pemerintah daerah, antara lain adanya pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan, merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja, pengalokasian dana secara optimal dengan didasarkan efesiensi unit kerja, dan menghindari pemborosan.

Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rico Ales Sandra, dkk (2014) dan menurut Nur Laila Yuliani (2014). Menurut Rico Ales Sandra, dkk (2014) tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan penerapan *good goverment* tehadap penilaian satuan kerja perangkat daerah bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD. Sedangkan menurut Nur Laila Yuliani (2014), menyatakantentang pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah akuntabilitas publik bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

## V. Kesimpulan dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung dengan kontribusi yang diberikan sebesar 13,6%. Arah hubungannya positif, yang berarti semakin baik pengelolaan keuangan daerah dalam hal akuntabilitas, kejujuran, transparansi, pengendalian dan *value for money* akan berdampak pada baiknya kinerja pemerintah daerah. Pada kenyataannya di lapangan masih ada beberapa masalah pada pengelolaan keuangan daerah seperti permasalahan pada kurang baiknya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung.

2. Secara parsial, anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung dengan kontribusi yang diberikan sebesar 33,4% dengan arah hubungan yang positif, yang berarti semakin baiknya anggaran berbasis kinerja dari tahapan perumusan strategi sampai ke *feddback* akan berdampak baik pada kinerja pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya di lapangan ada beberapa permasalahan mengenai variabel ini, seperti:

   a. Perumusan strategi yang kurang maksimal
   b. Pemerintah daerah tidak memiliki perencanaan yang matang dalam mengelola anggaran. Akibatnya, banyak dana yang seharusnya dibelanjakan untuk kepentingan publik tidak tersalurkan.

### 5.2 Saran

1. Untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, harus lebih teliti dalam pencatatan transaksi keuangan agar semua tercatat dengan baik dan benar. Serta yang paling harus ditekankan menurut peneliti adalah akuntabilitas dan transparansinya, karena dengan pemerintah daerah memperbaiki atau lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, masyarakat atau pihak lain dapat mengawasi pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk meningkatkan anggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah menurut peneliti, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus melakukan pengawasan penuh pada tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja setiap SKPD. Selanjutnya untuk pengguna anggaran harus lebih bisa mempertanggungjawabkan anggaran tersebut dengan membuat laporan pertanggungjawaban, pencapaian kegiatan, dan tujuan yang efektif dan efesien.

## DAFTAR PUSTAKA


A, Erwan., dan Dyah Ratih. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.

Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Abdul Halim & Syam Kusufi . 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. Edisi 4.

Abdul Halim, Yanuar E. Restianto, I Wayan Karman. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kapita Selekta Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Abdul Halim & Theresia Damayanti. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Abdul Rohmah. 2008. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 9 No. 1:21-32.

Askam Tuasikal. 2009. *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku)*. Universitas Pattimura Ambon. Ambon. ISSN: 1410-8623

Azwar, S. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Baldric Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Barker et al. (2002). *Research Methods In Clinical Psychology*. John Wiley & Sons Ltd. England.

Chabib Sholeh dan Heru Rohcmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.

Chabib Soleh dan Suripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Jatinangor: FOKUSMEDIA.

Deddi Nordiawan dkk, 2007. *Akuntansi Pemerintahan* , Jakarta : Salemba Empat.

Deddi Nordiawan dkk, 2014. *Akuntansi Pemerintahan* , Jakarta : Salemba Empat.

Denny Abdullah. 2015. *Astaga Silpa Kabupaten Bandung Tembus Rp 600 Miliar*. Melalui http://bandung.bisnis.com/read/20150508/82444/533161/astaga-silpa-kabupaten-bandung-tembus-rp600-miliar [09/10/2016].

Denny Abdullah. 2015. *FDA Kab. Bandung Hadiahi Raport Merah Terhadap Bupati Dadang*. Melalui http://www.soreangonline.com/2015/12/07/fda- kab-bandung-berikan-raport-merah-terhadap-bupati-dadang.html. [20/12/2016].

Denny Abdullah. 2016. *Penegak Hukum Lamban Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Rendah*. Melalui http://www.inilahkoran.com/berita/bandung/57242/penegak-hukum-lamban-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-rendah [13/10/2016].

Ellen Cristina. 2011. *Anggaran Perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Erwin Gunawan. 2015. *Silpa Setengah Triliun Lebih, Kinerja Pemkab Bandung Dinilai tak Maksimal*. Melalui http://www.pikiranrakyat.com/bandungraya/2015/05/07/326386/silpa-setengah-triliun-lebih-kinerja-pemkab-bandung-dinilai-tak [12/10/2016].

Fauzi Wahyudi Manggopa. 2014. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinera terhadap Kinerja SKPD Dilingkungan Pemerintah*. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Gorontalo.

Febrina Astria Verasvera. 2015. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah*. Jurnal Managemen Vol.15 No. 2 Mei 2016.

Fladimir Edwin Mbon, 2014. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Guilford, J.P. 1956. *Fundamental Statistic in Psychology And Education*. 3rd Ed. New York: McGraw-Hill Bokk Company, Inc.

Hair, J.F, *et al*. 1995. *Multivariate Data Analysis with Readings 4th Edition*. New Jersey: Prentioe-Hall.

Ika Dian Anugerahani, Sentot Imam. 2013. *Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri)*. Jurnal Akuntansi. Vol. 2, Nomor 2

Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indah Yuliani Mone, H. Rahardjo Adisasmita, Mediaty. 2012. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah Di Kabupaten Pangkep*. Jurnal Akuntansi. Universitas Hasanudin.

Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*: PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 4. Erlanga. Jakarta.

Ira Halidayati. 2014. *Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal, dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)*. Jurnal. Universitas Negeri Padang.

Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta : Gaung Persada Press.

Ismail Molamahu, dkk. 2015. *Pengaruh Pengelolan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango*. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo. Vol 3, No1.

Jalaluddin, Dafi Bahri, 2009. *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggran, dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Universitas Syiah Kuala. Vol.2, No. 1.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kelima. Andi Offset. Yogyakarta.

Mei Anjarwati, 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Semarang. ISSN 2252-6765.

Mohamad Mahsun. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE: Yogyakarta.

Muindro Renyowijoyo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba (Edisi3)*. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

M. Nafarin. 2012. *Penganggaran Perusahaan*. Salemba Empat. Jakarta.

Nurhalimah, Darwanis, Syukriy Abdulla. 2013. *Pengaruh Partisipasi Peyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Di Pemerintah Aceh*. Jurnal Akuntansi. Universitas Syiah Kuala. ISSN 2302-0164.

Nur Indriantoro, Bambang Supomo. 2002. *Metedologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Edisi Pertama, Penerbit BPFE.

Nur Laila Yuliani. 2014. *Pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan keuangan daerah dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas publik*. Tesis. UGM.

Prihandini, A.N. (2011). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Supartono. 2016. *Kinerja Buruk, Kepala SKPD Terancam Dicopot*. Melalui googleweblight.com/?lite_url=http://www.harianjogja.com/baca/2016/01/09/pemerintah-daerah-kinerja-buruk-kepala-skpd-terancam-dicopot-678890&lc=idID&s=1&m=957&host=www.google.co.id&ts=1479616317&sig=AF9NedlLEOhm1emP3UVk2gYGJojdtK7PzA&lite_refresh=1479616791298 [19/11/2016].

Rahmad Hidayat. 2015. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman)*. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang. Padang. Vol.3, No.1.

Rico Ales Sandra, Kennedy, Rheny. 2014. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penerapan Good Goverment terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hulu)*. Jurnal Akuntansi. Universitas Riau. Pekanbaru. JOM FEKON Vol. 1 No. 2.

Sem Paulus Silalahi. 2012. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemrintahan di Kota Dumai)*. Jurnal Ekonomi. Universitas Riau. Pekanbaru. Volume 20, Nomor 3.

Subana, M. Dan Sudrajat. (2005). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah.* Bandung:CV Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfa Beta: Bandung.

Sugiyono. 2002. *Statistik Untuk Penelitian*: Alfa Beta, Bandung.
Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sutriningsih. 2012. *PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH( Penelitian Pada Pemerintah Kabupaten Jepara)*. Jurnal Akuntasi.

Tendi Haruman. 2010. *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Tubagus Syah Putra. 2010. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Di Pemerintah Kabupaten Simalungun*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah: Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Genesis.

Yang. Keifeng & Miller, Gerald J. 2008. *Handbook of Research Methods in Public Administration Taylor & Francis Group: CRC Press U.S.*

Yusmulizar. 2014. *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang.

_____.Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.